

The logo of Universitas Muhammadiyah Ponorogo is a purple shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, surrounded by a green and white floral wreath. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written along the top inner edge, and "PONOROGO" is written along the bottom inner edge. Two white stars are positioned on the left and right sides of the lower part of the shield.

**LAMPIRAN 1**  
**DAFTAR PERTANYAAN**  
**WAWANCARA**

## DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai dengan apa jawaban yang diberikan narasumber, adapun narasumber yang di wawancarai diantaranya yaitu Kepala Desa Ngranget, Sekretaris Desa, dan bendahara desa.

### A. Akuntabilitas pengelolaan APBDes

1. Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat supaya mengetahui dan bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?
2. Bagaimana bentuk perwujudan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan?
3. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan APBDes?
5. Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi?
6. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?
7. Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa?
8. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa?
9. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa daam pembangunan desa?
10. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?
11. Apakah program yang dibiayai oleh APBDes sudah sesuai dengan harapan?
12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes?

13. Apakah Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun?

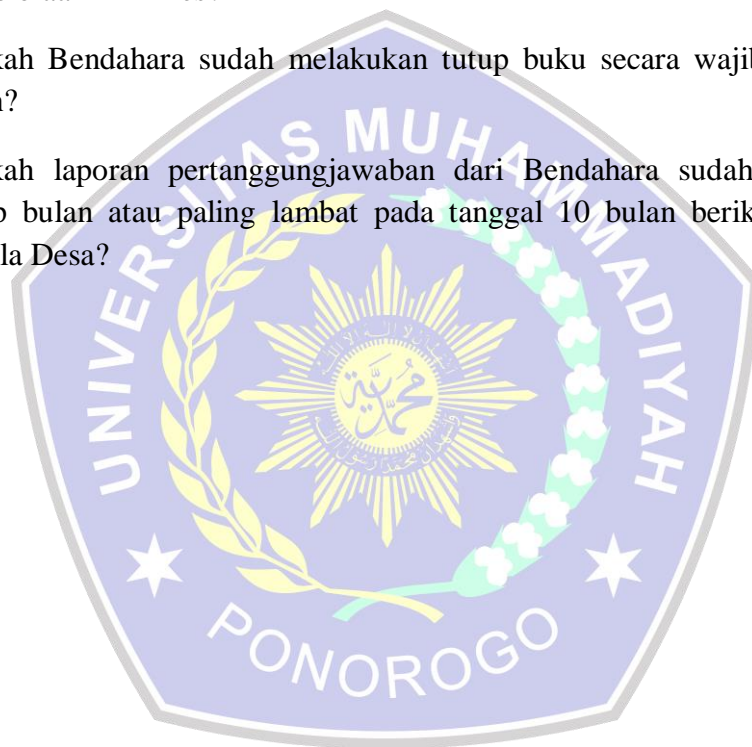
B. Transparansi Pengelolaan APBDes

1. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat?
3. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan desa?
4. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pembangunan desa?
5. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?

C. Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes

1. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan APBDes sesuai dengan UU yang berlaku ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada?
3. Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?
4. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes?
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam prosedur perencanaan pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes?
7. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksana dana desa?
8. Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai apa yang direncanakan?
9. Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan APBDes?
10. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan APBDes?

11. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan APBDes?
12. Adakah kesulitan atau hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?
13. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
14. Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan?
15. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes?
16. Apakah Bendahara sudah melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan?
17. Apakah laporan pertanggungjawaban dari Bendahara sudah disampaikan setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa?





## A. Akuntabilitas pengelolaan APBDes

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?	Kitakan secara tansparan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku misalnya kalau sudah di SPJkan dan sudah di RABkan nanti kita laksanakan bersama-sama dengan melibatkan semua perangkat dan kasun.
2	Bagaiman bentuk perwujudan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan?	Setelah itu nanti sudah dilaksanakan semuanya kalau sesudah ada pengecekan misalkan dari respektorat atau dari pihak kecamatan contohnya kaya monev itu bisa dicek kelokasi jadi semua anggaran tahap pertama tadi pertanyaan nomor satu tadi sudah dilaksanakan hasilnya bisa dicek dilokasi dan selesai berarti
3	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa?	Yang terutama yang diikutkan itu nanti termasuk tpk (tim pengelola kegiatan) dan tpkd itu yang juga ikut bertanggungjawab bisa masuk ke lapangan dan bisa mengecek anggaran itu
4	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan APBDes?	Kalau APBDes itu nanti sesudah semuanya tercair kan itu bertahap ada tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga. Misalkan tahap satu sudah selesai nanti tahap berikutnya juga diadakan musdus dan musrengbangdes
5	Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi?	Pada aturan itu misalkan anggarannya itu dipatok misalkan untuk rabat jalan kan anggarannya itu lima puluh juta itu nanti kepotong PPN dan PPh nya sehabis itu nanti tinggal sisanya untuk pelaksanaan
6	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Ya prinsipnya itu nanti kita sebelum pelaksanaan kita kan sudah koordinasi dengan perangkat-perangkat bahkan misalkan ada titik mana yang mau kita rencanakan sesudah itu nanti menunggu tahap pencairan misalkan tahap termin satu dan termin dua.Sesudah itu

		pelaksanaan nanti baru kita melaksanakannya
7	Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa?	Sesudah itu nanti kalau sesudah ada pelaksanaan nanti biasanya setiap tahun itu kitakan laporan kewarga dan laporan kekasun-kasun misalkan sudah pelaksanaan tahap kesatu kasun satu, tahap kedua, tahap ketiga itu nanti kasun satu dan bulan berikutnya misalkan kasun ketiga nanti dilaksanakan sesudah dilaksanakan nanti tutup tahun kita baru melaporkan sesudah itu nanti ada pengecekan laporan dari inspektorat
8	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa?	Dalam pengelolaannya kan sudah pelaksanaan misalkan itu nanti kita akan mengumpulkan semua tokoh masyarakat, pak rt, pak kasun dan lembaga desa contohnya kan LPKMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan semua perangkat desa dikumpulkan nanti menyampaikan aspirasinya dengan anggaran itu sudah terserap misalkan satu tahun nanti kan kita sudah laporkan kewarga biar transparan
9	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Misalkan ini suatu contoh termin satu tahap kesatu pencairan ADD misalkan dari tingkat desa itu kan ada beberapa kasun misalkan dari kasun satu itu yang kena itu usulan yang kemarin musdus, murengbang, dan penetapan itu ditetapkan di rt( misalkan rt 6 itu kan kasun berarti kasun satu dikepuh) itu nanti kan sebelumnya yang kita musyawarahkan dulu dengan pak rtnya dan dilingkungan yang mau mendapatkan anggaran itu untuk pelebaran jalan, rabat jalan , dan drainase dan sebagainya
10	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan	Ya, itu otomatis itu disampaikan. Karena kalau

	memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?	kita nggak sampaikan kita tidak ada perencanaan dulu, nantikan waktu kita melaksanakan tahu-tahunya kita memberi material dan sebagainya nanti kan lingkungan tidak tahu. Looo tahu-tahu kok gimana ini mau dibangun kok nggak ada musyawarah dan sebagainya
11	Apakah program yang dibiayai oleh APBDes sudah sesuai harapan?	Sudah semuanya, insyaallah semuanya sudah terlaksana
12	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes?	Ya itu nanti ketika waktu pelaksanaan biasanya untuk pelaksanaan itu kan ada salah satu warga misalkan warga mintanya ini rabat dulu ada problem sedikit misalkan ada yang drainasenya dulu itu nanti sesudah dikumpulkan nanti kan kita bisa sharring-sharing disitu akhirnya mana yang mau yang dibutuhkan yang paling utama begitu
13	Apakah kepala desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun?	Ya itu nantikan sudah ada aturan dan sudah ada perundang-undangan nya yang sudah diterjunkan ditingkat desa. Tingkat desa baru melaksanakan sesuai aturan misalkan dikota sesuai dengan peraturan Walikota kalau dikabupaten nanti sesuai dengan peraturan Bupati.

## B. Transparansi Pengelolaan APBDes

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	“Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?”	-
2	“Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat?”	Itu nanti dari pihak kepala desa pun menyampaikan aspirasinya kepada warga. Misalkan karena didesa itu banyakarganya karena ya anggaran itu bisa dibagi-bagi satu



		titik itu kita patok, misalkan sesuai dengan yang kita ukur rabat jalan misalkan 150 kita biayai perkiraan itu sekitar misal anggarannya itu 60 juta atau 70 juta
3	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan desa?	Ya itu nanti sesudah pelaksanaan berarti kita dikawal oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan biar sesuai anggaran itu yang terserap di wilayahnya masing-masing itu sesuai dengan strukturnya, volumenya proyek, dan itu dari desa tidak mengurangi dengan anggaran-anggaran itu. Jadi kalau misalkan terdapat 150 kita dari pihak desa, pihak kasun, dan pihak warga setempat dan pihak kepala lingkungan terutama pak rt nanti kita kawal bersama-sama biar sesuai biar kita transparan
4	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Sesudah itu kita mengumpulkan misalkan ada satu rt setempat, mendapatkan anggaran itu nominalnya berapa kita langsung transparan misalkan anggarannya ini ada anggaran sekian tapi nominalnya sudah sekian meter dan itu nanti ada potongan PPN dan PPh nya itu kan potongan wajib sesudah itu kita laksanakan bersama-sama dengan warga setempat
5	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat?	Jelas transparan, karena yang mempunyai hak itu juga masyarakat karena pemerintah desa itu hanya melaksanakan cuma gimana ya itukan juga haknya masyarakat. Berarti kan seandainya ada perkumpulan itu, kita kan mau ada perkumpulan, itu juga ibaratnya kita pengurusnya. Jadi desa tinggal memantapkan aja tinggal melayani dengan anggaran yang haknya warga setempat

### C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan APBDes

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1	Apakah pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan APBDes sesuai dengan UU yang berlaku?	Ya, itu otomatis yang sudah berlaku desa tidak pernah melanggar dengan undang-undang yang sudah diwajibkan atau undang-undang yang sudah berlaku
2	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada?	Itu pengelolaannya semuanya sudah ditata rapi sesuai dengan porsinya masing-masing dan yang mengelola itu kita juga ada porsinya sebelum perencanaan sudah dibagi dengan porsinya masing-masing misalkan rt A dan rt B itu nanti kita sesudah dilaksanakan, sudah di SPJkan, sudah di RABkan tinggal desa melaksanakan dengan semua perangkat yang ada terutamanya perangkat pak kasun
3	Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Pelaksanaannya setiap tahun kan ada tiga tahapan termin satu, termin dua, dan termin tiga dalam satu tahun itu kan dibagi tiga jadi setiap empat bulan sekali
4	Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes?	Sebelum itu kita rencanakan dulu, kita akan musyawarahkan dulu ada musdus, musdes dan sebelumnya ada musrengbangdes dan sesudah itu diterbitkan ditingkat desa, nanti sesudah musdus kita kan baru penetapan
5	Siapa saja yang dilibatkan dalam prosedur perencanaan pengelolaan dana desa?	Yang dilibatkan terutama kepala desa sebagai penanggungjawab pertama, bendahara desa sebagai penanggungjawab keuangan, dan para kasun sebagai pihak kepala wilayahnya masing-masing dan rt kepala lingkungannya dan ada satu atau dua tokoh masyarakat yang ikut dilibatkan disitu untuk mengawasi dan mengawasi waktu kita pelaksanaan, dengan apa yang disitu programnya ditingkat desa

6	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes?	Sistemnya ya seperti itu tadi mbak, sistemnya kan kita perencanaan dulu apa yang dibutuhkan itu yang paling valid paling baku dulu jadi kalau nggak ada misalkan warga itu nggak ditawar sebelumnya apa kebutuhan yang paling utama nanti, kan kita takutnya ada pro dan kontra tahu-tahu kita datangkan misalkan material atau gorong-gorong dan sebagainya dan ternyata diwilayah situ nggak sesuai dengan harapannya warga makanya kita dengan transparan apa kebutuhannya disitu baru kita dari pihak desa menanggapi baru melaksanakan dan nanti bisa ditetapkan diwaktu musdus atau musdes
7	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa?	Nah itu jelas dilibatkan, karena yang menerima itu nanti dengan program-program itu kan masyarakat sendiri
8	Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan?	Sudah sesuai semuanya sudah direncanakan dan sudah dibagi diporsinya masing-masing
9	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan APBDes?	Ya itu sistemnya nanti merencanakan misalkan tahun ini tahun 2022 program yang untuk 2023 itu sudah diprogram dari 2022 sebelumnya jadi 2023 sudah melaksanakan istilahnya nantikan nggak semrawut begitu anggaran sudah cair setiap tahun kita baru memprogram belum mengumpulkan tokoh-tokoh dan warganya itu nanti, kan kita semrawut itu sistemnya untuk pengelolaan itu direncanakan dulu kaya diadakan musdus musdes bangcam dan sebagainya itu nanti perencanaan misalnya suatu contoh tahun 2023 jadi perencanaan itu ditahun 2022 jadi setahun sebelumnya sudah direncanakan
10	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan APBDes?	Sistemnya nanti setelah pelaksanaan semuanya sudah selesai termin satu termin dua semuanya

		nanti dikumpulkan sosialisasi agar tidak ada kejanggalan-kejanggalan dengan warga dengan pemerintah desa
11	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan APBDes?	Pelaporannya itu nanti misalkan kita ada suatu contoh ada rapat ada mangun dan sebagainya jadi pelaporannya itu misalkan ada nota itu dikumpulkan berapa nominalnya berapa habisnya dan itu nanti waktu ada rapat itu ada notulennya semuanya dicantumkan disitu untuk pemberkasan untuk pelaporan kegiatan yang sudah di laksanakan
12	Adakah kesulitan atau hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?	Ya selama ini karena saya kepala desa yang baru sementara ini insyaallah kemarin sudah melaksanakan dan Alhamdulillah kan tidak ada ganjalan-ganjalan seperti itu ya cuma ada kekurangan artinya mungkin ada yang belum dimasukkan contoh kaya memasukkan potongan PPH, PPN nya itu kan ada notanya ada slipnya itu mungkin ada kekurangan itu karena belum dicantumkan berarti kekurangannya cuma itu kita kan tinggal membenahi, kaya kemarin kan ada seperti itu kaya monev dan sebagainya diteliti nanti ada yang kekurangan, ohh ini notanya kok belum masuk notanya ini untuk mamin kok belum masuk dan pajaknya kok belum masuk slipnya itu kemana, itu baru ada kekeliruannya seperti itu bukan keliru tapi kan untuk ada kekurangan nantikan kita bisa benahi ya cuma keganjalannya cuma itu, mungkinkan namanya manusia banyak kelalaian mungkin ada hal sedikit yang kurang pas tapi itu hal-hal yang ringan bukan hal yang besar cuma ada kelalaian sedikit kurangnya istilahnya seperti itu
13	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah	Ya semuanya sudah yang ditentukan itu kan harus sesuai nggak ada yang kelebihan nggak

	ditentukan?	ada yang kekurangan semuanya itu harus pas, sesudah pas itu baru ada pemeriksaan itu kan berarti sudah masuk misalkan ada penelitian ada pemeriksaan berarti ada kekurangan kita baru membenahi biasanya kan seperti itu
14	“Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan?”	Sistemnya desa sendiri harus mempertanggungjawabkan karena semuanya anggaran dari DD dan ADD semuanya haknya masyarakat haknya warga itu nanti dari desapun hanya penanggungjawab hanya sebagai pelayan apa yang dibutuhkan warga itu nanti desa bisa menanggapi dan sesuai dengan permintaannya warga desa baru melaksanakan dengan sesuai anggaran yang telah ditentukan
15	“Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan APBDes?”	Itu tergantung di pemerintahan desa kalau dipemerintahan desa itu benar-benar komitmennya benar-benar untuk membela warga itu nanti saya rasa warga pasti senang pasti suka tapi kalau pimpinannya itu nanti semauanya sendiri yang jelas warga pasti ada ganjalan bahkan ada kemarahanpun bisa juga terjadi, bahkan bisa juga terjadi demo bisa terjadi tanya kemana anggaran ini terlaksana sesudah di RABkan sesudah di SPJkan kok tidak terlaksana, kemana anggaran itu arahnya itu yang bertanggungjawab sepenuhnya tetap kepala desa, tapi kalau kepala desanya itu secara fare sama warga memang tahap ini bulan ini tanggal ini nanti sudah dilaksanakan berartikan sudah nggak ada keganjalan warga pun menerimanya bagus pemerintah desapun juga bagus tapi kalau di desanya itu pimpinannya itu semauanya sendiri saya rasa pasti ada pro dan kontra pasti ada problem besar pasti saya yakin pasti

16	Apakah bendahara desa sudah melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan?	Itu pasti misalkan ada anggaran ini sudah diteliti nanti waktu ada pengecekan itu kan pasti ada sekian pelaksanaan nanti ada rincian nanti sesudah tutup pelaksanaan tapi rinciannya sudah ada bisa dicek di desa, dari pihak pihak terkait kan nanti biasanya ada pengecekan seperti itu
17	Apakah laporan pertanggungjawaban dari bendahara sudah disampaikan setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa?	Biasanya itukan sudah dijadwalkan dari tahun-tahun yang dulu itu sebelum pelaporan kepemimpinan kepala desa biasanya kan sudah dijadwalkan misalkan dari per tanggal berapa nanti per akhir tanggal berapa itu semuanya sudah terlaksana dan sudah terealisasi baru melaporkan dan pimpinanpun kepala desa baru meneliti apakah benar sesuai dengan yang dicantumkan di bendahara, nanti kalau ada kekurangan kepala desa bis bertanya kepada bendahara.



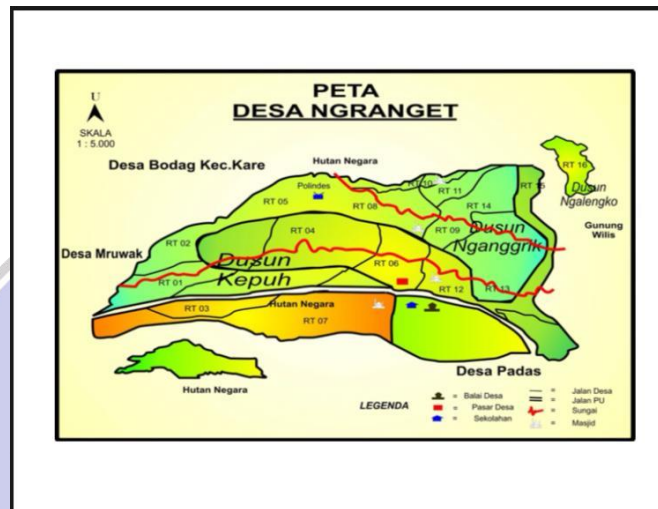
# **LAMPIRAN 3**

## **DOKUMENTASI**





Gambar 1. 1 Profil Desa Ngranget Kec. Dagangan Kab. Madiun



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Desa Ngranget Kec. Dagangan Kab. Madiun

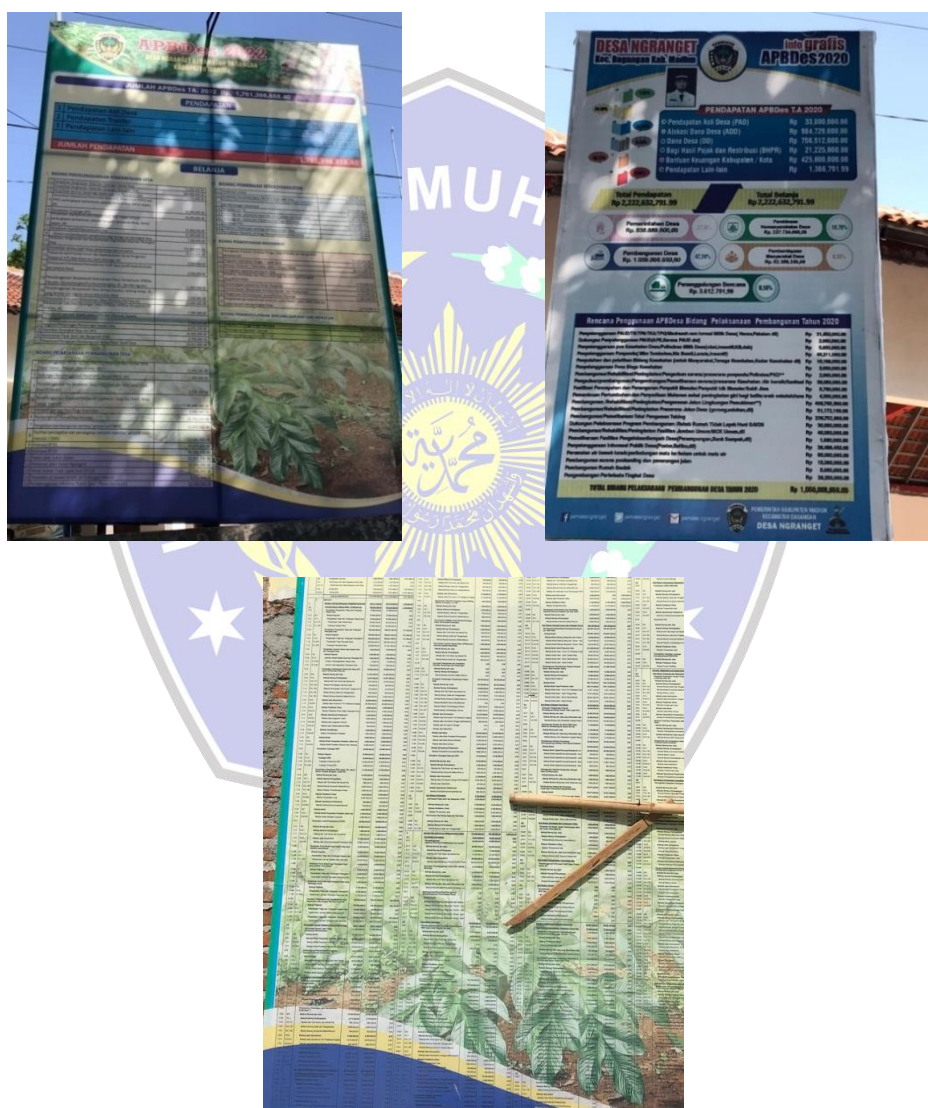


Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngranget Kec. Dagangan Kab. Madiun





Gambar 1. 4 Mekanisme Kerja Tahunan Pemerintah Desa Ngranget Kec. Dagangan Kab. Madiun



Gambar 1. 5 Laporan APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PENDAFTARAN DESA NGRANGET TAHUN ANGGARAN 2021						
Kategori	Kode	Uraian	Realisasi s.d. 31/12/2021			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Uraian
PENDAPATAN	1	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
Jumlah Pendapatan			33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
BELANJA	2	Belanja Pelaksanaan Pemerintahan Desa	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	
			700.000,00	700.000,00	100,00	
Jumlah Belanja			23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PENDAFTARAN DESA NGRANGET TAHUN ANGGARAN 2021						
Kategori	Kode	Uraian	Realisasi s.d. 31/12/2021			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Uraian
PENDAPATAN	1	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
Jumlah Pendapatan			33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
BELANJA	2	Belanja Pelaksanaan Pemerintahan Desa	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	
			700.000,00	700.000,00	100,00	
Jumlah Belanja			23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	

Gambar 1. 7 Laporan Realisasi ADD Desa Ngranget Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PENDAFTARAN DESA NGRANGET TAHUN ANGGARAN 2021						
Kategori	Kode	Uraian	Realisasi s.d. 31/12/2021			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Uraian
PENDAPATAN	1	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
Jumlah Pendapatan			33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
BELANJA	2	Belanja Pelaksanaan Pemerintahan Desa	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	
			700.000,00	700.000,00	100,00	
Jumlah Belanja			23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	

Gambar 1. 8 Laporan Realisasi DD Desa Ngranget Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PENDAFTARAN DESA NGRANGET TAHUN ANGGARAN 2021						
Kategori	Kode	Uraian	Realisasi s.d. 31/12/2021			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Uraian
PENDAPATAN	1	Pendapatan Asli Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
Jumlah Pendapatan			33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	
BELANJA	2	Belanja Pelaksanaan Pemerintahan Desa	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	
			700.000,00	700.000,00	100,00	
Jumlah Belanja			23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	

Gambar 1. 9 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumberdana Desa Ngranget Tahun 2021



Gambar 1. 10 Perbaikan Infrastruktur Kesehatan Desa Ngranget Tahun 2022



Gambar 1. 11 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMK



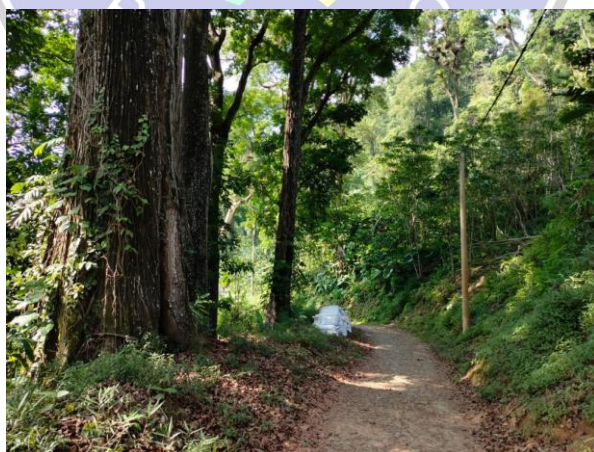
Gambar 1. 12 Kegiatan Posyandu Lansia



Gambar 1. 13 Rapat Evaluasi dalam proses Perencanaan dan Pelaksanaan



Gambar 1. 14 Rapat Kerja Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (LPKMD)



Gambar 1. 15 Akses Jalan Menuju Dusun Nglengko



Gambar 1. 16 Pelebaran Jalan Rt 13



Gambar 1. 17 Akses Jalan Menuju Rt 15



Gambar 1.19 Akses Jalan ke Rt 07



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : [akademik@umpo.ac.id](mailto:akademik@umpo.ac.id) Website : [www.umpo.ac.id](http://www.umpo.ac.id)  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : **WIDYA CANDRA PRATIWI**
2. NIM : 17441461
3. Jurusan : Ekonomi
4. Bidang : S1 Akuntansi
5. Alamat : Jl. Pulo Rt 024 Rw 008 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun
6. Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan an Belanja Desa Studi Kasus Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2021
7. Masa Pembimbingan : Maret 2022 s/d Agustus 2022
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
15-3-2022	Revisi Proposal	f. f.
21-3-2022	Revisi Proposal	f. f.
27-3-2022	ACC Proposal	f. f.
31-3-2022	revisi proposal	f. f.
3-4-2022	revisi proposal	f. f.
4-4-2022	ACC proposal	f. f.
17-4-2022	Revisi Bab 1,2,3	f. f.
29-4-2022	Revisi Bab 1,2,3	f. f.
30-4-2022	ACC Bab 1,2,3	f. f.
20-5-2022	revisi bab 1,2,3	f. f.
	selesaian buku bn	
	biyan dg pembtg 2 & bab 5	
	baru ke pemb I.	

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
17-6-2022	Revisi Bab 4 & 5	F.
29-6-2022	Revisi Bab 4 & 5	F.
2-7-2022	Revisi Bab 4 & 5	F.
13-7-2022	ACC Bab 4 & 5	F.
14-7-2022	Revisi bab 1, 2, 3	F.
	menemui sy & kampus	F.
20-7-2022	Revisi bab 4	F.
	menemui sy & kampus	F.
21-7-2022	Celestiasion 97	F.
24-7-2022	Revisi bab 5	F.
25-7-2022	ACC bab 1-5	F.

10. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi : \_\_\_\_\_
11. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : \_\_\_\_\_
12. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai : \_\_\_\_\_ (angka)  
 \_\_\_\_\_ (huruf)

Pembimbing,

**Dra. Hj. KHUSNATUL ZULFA W., MM, Ak. CA.**  
 NIDN. 0722056704

Ponorogo, 15 Maret 2022



**WAGIYADI SUMARSONO, M.Si**  
 NIP. 19760508 200501 1 002





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website:www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 647-IV.4/PN/2022  
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 14 Juni 2022

Kepada :

Yth. Kepala Bakesbangpoldagri Kab. Madiun  
Jl. MT. HARYONO Caruban

*Assalaamualaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SLAMET SANTOSO., M.Si  
NIK : 19701016 199904 12  
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : WIDYA CANDRA PRATIWI  
NIM : 17441461  
Semester : 8 (DELAPAN)  
Jurusan : S1 AKUNTANSI  
No. HP : 089653410156  
Lokasi/Objek : Kantor Kepala Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten  
Madiun  
Lama Penelitian : 3 BULAN  
Bidang : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA Studi Kasus Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten  
Madiun Tahun 2018-2021.

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalaamualaikum wr. wb.*

Wakil Dekan,  
  
  
Dr. SLAMET SANTOSO., M.Si  
NIK. 19701016 199904 12